

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah alat untuk mencapai kesejahteraan yang sebagaimana di amanatkan dalam UU 1945, Pemerataan pembangunan sampai ke pelosok negeri Indonesia selalu menjadi perhatian khusus dari tahun ke tahun yang tidak kunjung selesai. Maka dari itu masalah peningkatan indeks manusia (IPM) menjadi fokus untuk mencapai kesejahteraan di Indonesia. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi pilar dalam pembangunan di Indonesia dan Beberapa faktor yang menentukan kesejahteraan suatu negara di lihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, faktor tersebut dapat dicapai secara maksimal dengan pembangunan manusia secara maksimal .

Pembangunan manusia menggambarkan peningkatan terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia. Alat ukur atau indikator yang dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu membawa pada kondisi keberhasilan pembangunan menurut UNDP adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2009), sebagai ukuran kinerja pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Angka Melek Huruf penduduk dewasa (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),

sedangkan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator daya beli (BPS, 2009).

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia (Muliza, 2017). Muliza dalam penelitiannya menyatakan bahwa, sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut (Sulistiawati 2012).

Maka dari itu, Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan pilar utama majunya suatu negara yang dapat dilihat dari peran strategis sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia mengalami peningkatan pertahunnya, Dari tahun 2013 indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan yaitu 68,31 menjadi 71,94 pada tahun 2020.

Tabel 1 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2013-2020

No.	Tahun	Indeks Pembangunan manusia (IPM)
1	2013	68,31
2	2014	68,90
3	2015	69,55
4	2016	70,18
5	2017	70,81
6	2018	71,39
7	2019	71,92
8	2020	71,94

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Pengertian indeks pembangunan manusia sebagaimana yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) yaitu “merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) didapatkan dari hasil pengukuran perbandingan angka harapan hidup, angka melek huruf yang dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dan kemampuan daya beli masyarakat untuk semua negara seluruh dunia. Tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat untuk dapat berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan produktivitas dan kreatifitas mereka (Izzah, 2015).

Banyak upaya yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia (IPM) mulai dari melakukan Desentralisasi sampai meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi peran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) tidak dapat di kesampingkan karna memiliki tujuan dan korelasi yang sangat erat. Salah satunya adalah Dompot dhuafa suatu lembaga yang mengelola dan menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dari umat yang akan di distribusikan kepada mustahik.

Melalui Websitenya Dompot Dhuafa menuturkan bahwasanya Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat *Empowering People* dan kemanusiaan. Pemberdayaan bergulir Melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), Serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Dalam Pengelolalaanya mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai

akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sebagai landasan Dompot Dhuafa Melaksanakan lima pilar program, M. Umer (2001) menjelaskan dalam bukunya *Dalam Ekonomi Islam*, sistem distribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ada skala prioritasnya. Indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari distribusi dibingkai dalam lima kemaslahatan pokok, yaitu perlindungan keimanan, keluhuran jiwa, keturunan yang baik, akal yang sehat, dan jaminan kepemilikan harta kekayaan. *Maqashid Syariah* adalah rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Jika kita menganut kepada *Maqashid Syariah* sebagai tujuan dari perekonomian, maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai.

Saat ini zakat semakin berperan menjadi salah satu instrumen dalam pembangunan manusia, khususnya di Indonesia. Konsep zakat sebagaimana yang dikatakan Beik (2010), pada dasarnya memiliki tiga dimensi pokok, yaitu dimensi spiritual personal, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat merupakan sarana ibadah dan penyucian jiwa seseorang. Dengan berzakat produktivitas individual akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam dimensi ekonomi, Beik lebih lanjut menjelaskan bahwa zakat memiliki dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Jika dikaji lebih mendalam, ketiga dimensi di atas memiliki hubungan positif dengan parameter pembangunan manusia yang terdiri atas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Di sisi lain, zakat juga memiliki korelasi dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Pramanik (1993) menyatakan bahwa zakat berpengaruh pada investasi dan produksi, saving, dan konsumsi. Pada sisi investasi, zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana produktif bagi pengembangan usaha mikro penerima zakat (mustahik). Pengembangan usaha mikro ini bisa membantu perekonomian Indonesia dan relatif memiliki daya tahan lebih besar dalam situasi krisis ekonomi. Pada sisi konsumsi, pemberian zakat dapat menstimulus peningkatan aggregate demand (permintaan agregat). Kenaikan permintaan agregat akan mendorong peningkatan dari sisi supply, sehingga perekonomian akan semakin berkembang. Namun, efektivitas penggunaan zakat sebagai instrumen peningkatan pembangunan akan dipengaruhi oleh aspek kinerja lembaga-lembaga zakat dan potensi dana zakat itu sendiri.

Melalui tiga dimensi dasar indeks pembangunan manusia (IPM) dan Korelasi yang sangat erat dengan lima pilar program Dompot Dhuafa. Penelitian ini akan mengkaji penyaluran Dompot Dhuafa pada aspek Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Dengan menggunakan pendanaan pada aspek Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih jarang ataupun pada umumnya belum digunakan pada penelitian sebelumnya, sehingga pendanaan ini dilakukan untuk upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Menurut Putra dan Arka (2018) oleh Rossalia (2019), konsep lingkaran setan kemiskinan Ragnar Nurkse menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas dapat memutus mata rantai kemiskinan. Konsep teoritis ini didukung oleh pemikiran Aimon (2012)

dari Winarti (2014). Semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan seseorang, semakin mudah mengakses pekerjaan, semakin mudah melakukan pekerjaan yang canggih secara teknis, dan pada akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Penyaluran dana untuk Kesehatan tentu berperan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia . Perkembangan penyaluran dana Kesehatan dari Dompot Dhuafa di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1 2 Indeks Pembangunan Manusia Dan Penyaluran Dana Kesehatan Dompot Dhuafa Di Indonesia

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kesehatan (Rp)
1	2013	68,31	49.454.857.218
2	2014	68,90	57.920.000.000
3	2015	69,55	56.250.000.000
4	2016	70,18	26.427.000.000
5	2017	70,81	39.843.000.000
6	2018	71,39	42.280.000.000
7	2019	71,92	40.550.000.000
8	2020	71,94	22.646.000.000

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS), Dompot Dhuafa (2013-2020)

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa penyaluran dana kesehatan yang dialokasikan oleh Dompot Dhuafa di Indonesia mengalami naik dan turun. Pada tahun 2013 jumlah penyaluran dana kesehatan sebesar 49,4 milyar rupiah mengalami peningkatan menjadi 57,9 milyar rupiah pada tahun 2014. Dan terus mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2015 hingga 2020 dengan jumlah 22,6 milyar Rupiah.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dan sehat fisik, batin maupun jiwa yang membuat seseorang dapat melakukan kegiatannya dan menghasilkan produktivitas. Kesehatan memiliki keterkaitan erat satu sama lain dengan pembangunan. (Todaro, 2008) menyebutkan bahwa kesehatan merupakan tujuan

pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain, sehingga menjadi hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan. Jadi kesehatan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2013).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Todaro dan Smith (2003) bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Rumate 2015).

Selain Kesehatan, Pendidikan juga sangat mempengaruhi penyaluran dana dompet dhuafa terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan penyaluran dana kesehatan Dompet Dhuafa di Indonesia dapat dilihat pada table 1.3 dibawah ini:

Tabel 1 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Penyaluran Dana Pendidikan Dompet Dhuafa Di Indoneisa

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendidikan (Rp)
1	2013	68,31	43.934.830.694
2	2014	68,90	48.310.000.000
3	2015	69,55	51.430.000.000
4	2016	70,18	38.003.000.000
5	2017	70,81	42.475.000.000
6	2018	71,39	42.360.000.000
7	2019	71,92	50.850.000.000
8	2020	71,94	38.184.000.000

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS), Dompet Dhuafa (2013-2020)

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa penyaluran dana Pendidikan Dompet Dhuafa trennya mengalami naik turun. Pada tahun 2013 penyaluran dana kesehatan 43,9 milyar rupiah mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 51,4 milyar rupiah pada tahun 2015. Kemudian terus mengalami penurunan setiap tahunnya hingga sebesar 38,1 milyar rupiah pada tahun 2020.

Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun bimbingan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok agar menjadi sosok yang dapat menghasilkan suatu kreativitas maupun inovasi yang bermanfaat dan berguna. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, Todaro (2008) juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sehingga merupakan hal fundamental untuk

membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Tri Maryani (2012) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia diuji oleh Astir Meylina (2012). Hasil perhitungan disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM.

Selanjutnya, penyaluran dana ekonomi Dompot Dhuafa juga dapat mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Ranis (2004), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin.

Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk, distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi

pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez,1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP,1996). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Perkembangan penyaluran dana Dompot Dhuafa untuk ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Penyaluran Dana Ekonomi Dompot Dhuafa Di Indonesia

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ekonomi (Rp)
1	2013	68,31	12.229.770.155
2	2014	68,90	26.500.000.000
3	2015	69,55	49.380.000.000
4	2016	70,18	29.242.000.000
5	2017	70,81	56.667.000.000
6	2018	71,39	56.310.000.000
7	2019	71,92	38.450.000.000
8	2020	71,94	39.071.000.000

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS), Dompot Dhuafa (2013-2020)

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penyaluran dana Dompot Dhuafa untuk ekonomi trennya mengalami peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2013 sebesar 12,2 milyar rupiah menjadi 56,6 milyar rupiah pada tahun 2017 atau 363%. Pada tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan sebesar 17,6 milyar rupiah. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu menjadi masalah pada pembangunan di Indonesia dan adanya

sebuah lembaga diluar pemerintahan yakni Dompot Dhuafa yang memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri, peneliti ingin melihat apakah Dompot Dhuafa memiliki pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indoensia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyaluran Dompot Dhuafa Pada Aspek Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Berlandaskan Maqasid syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berlandaskan maqasid syarriah Beberapa besar pengaruh penyaluran dana kesehatan Dompot Dhuafa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia?
2. Berlandaskan maqasid syariah seberapa besar pengaruh penyaluran dana Pendidikan Dompot Dhuafa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia?
3. Berlandaskan maqasid Syariah Seberapa besar pengaruh penyaluran dana ekonomi Dompot Dhuafa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini di buat adanya perumusan dari masalah serta fenomena, adapun tujuannya yaitu seperti berikut ini :

1. Untuk mengetahui dengan berlandaskan maqasid syariah seberapa besar pengaruh penyaluran dana Kesehatan Dompot Dhuafa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dengan berlandaskan maqasid syariah seberapa besar pengaruh penyaluran dana pendidikan Dompot Dhuafa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dengan berlandaskan maqasid syariah seberapa besar pengaruh penyaluran dana ekonomi Dompot Dhuafa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Setelah mengetahui pengaruh penyaluran dana Dompot Dhuafa dengan berlandaskan maqasid syariah pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara akademis diharapkan mampu meningkatkan wawasan pengetahuan penulis tentang kesehatan, pendidikan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Bagi pihak – pihak lain atau peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan atau referensi dalam melakukan atau melaksanakan penelitian yang sama dimasa mendatang dengan ruang pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Menambah wacana pustaka bagi akademika Universitas Malikussaleh khususnya Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Ekonomi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Setelah mengetahui pengaruh pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap pengetasan kemiskinan secara praktis juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan di Indonesia dalam rangka mengevaluasi kebijaksanaan dan menyusun strategi perencanaan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat memberikan informasi, sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran maupun pertimbangan lebih lanjut bagi pihak yang membutuhkan seperti pihak perusahaan maupun masyarakat.